

PUBLIC EVALUATION ON THE ACCESS TO INFORMATION ON NEW STUDENT ENROLLMENT

Lina Miftahul Jannah

Abstract

This research aimed to describe the public evaluation on the access to the information concerning the new student enrollment process in senior high schools (SMA) in Depok municipality in the academic year of 2007/2008. Data were collected using a questionnaire. Sample (N=285) was recruited using the cluster random sampling technique from all classes in all schools in the area. Findings suggested that 1) most students got access to the information from teachers or schools, 2) students still could not get access to information related to the conversion value added to the UAN score for those who were considered high achieving students in either Depok Municipality level or national level, with the value range of 3 to 7.5, and 3) the use of Internet to deliver enrollment information was still limited, particularly due to the limited ability of the human resources and technology.

Key words: *evaluation, access to information, information, new student enrollment*

EVALUASI PUBLIK ATAS PEROLEHAN INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU

Lina Miftahul Jannah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Evaluasi Publik atas Perolehan Informasi Penerimaan Siswa Baru (Studi pada Pelajar SMA Negeri Kelas 1 Tahun Ajaran 2007/2008 di Wilayah Kota Depok). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelajar kelas 1 pada tahun ajaran 2007/2008 SMA Negeri di Kota Depok, dengan teknik penarikan sampel klaster dari kelas yang ada di setiap sekolah di Kota Depok, dengan ukuran 285 responden. Hasil penelitian menunjukkan: 1) sebagian besar siswa mengetahui informasi PSB dari guru atau sekolah; 2) masih ada informasi yang belum diketahui siswa yaitu tentang konversi nilai tambahan terhadap nilai UAN bagi siswa yang dianggap berprestasi, baik di tingkat Kota Depok hingga tingkat Nasional dengan rentang nilai 3 sampai 7,5; dan 3) penggunaan media Internet untuk penyampaian informasi masih belum sepenuhnya berfungsi.

Kata kunci: *evaluasi, keterbukaan, informasi, penerimaan siswa baru*

Pendahuluan

Salah satu butir tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea empat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dasar ini, pemerintah sudah seharusnya menyediakan berbagai kebijakan yang mendukung upaya mencerdaskan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Ace Suryadi, Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional, mengatakan, investasi pendidikan yang dilakukan sejak pemerintahan Soeharto telah salah kaprah, karena sejak reformasi bergulir sampai sekarang belum ada restrukturisasi program pendidikan yang berarti. (Kompas, 4 September 2004). Dari hari ke hari manusia yang terlibat dalam pendidikan bukannya tumbuh kian cerdas, tetapi mutunya semakin menurun meski input fasilitas fisiknya terus bertambah. Kondisi ini menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan pendidikan yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Masih adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan dari Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua telah dijembatani pemerintah dengan membuat Ujian Akhir Nasional dengan standar yang setiap tahun semakin meningkat. Ujian Akhir Nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2003 juga bukan tidak menimbulkan polemik. Keputusan pemerintah menghapus Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional membawa pada kondisi Ujian Akhir Nasional menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa selama menempuh pendidikan, mulai tingkat Sekolah Dasar, hingga tingkat Sekolah Menengah Atas. Keberhasilan ini pun juga didasarkan hanya dengan tiga mata pelajaran saja yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika (untuk SMA IPA) atau Ekonomi (untuk sisa SMA IPS) atau Bahasa Asing lain (untuk SMA Bahasa). Dengan target awal setiap pelajaran minimal memiliki nilai 3,00; pada tahun 2007 nilai tersebut semakin meningkat menjadi rata-rata 5,00 dengan tidak boleh ada nilai kurang dari 4,25 atau memiliki nilai 4,00 untuk satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lain minimal 6,00.

Setelah lulus Ujian Nasional (Ujian Akhir Nasional berubah namanya menjadi Ujian Nasional pada tahun 2005), siswa pun masih dihadapkan pada masalah pendaftaran ke sekolah yang lebih tinggi. Setiap wilayah memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan penerimaan siswa baru (selanjutnya disebut PSB). Di Jakarta, PSB dipusatkan di satu sekolah. Siswa mendaftar untuk beberapa sekolah sekaligus dan akan diprioritaskan sesuai dengan nilai yang diperolehnya. Siswa tinggal menunggu mereka diterima di sekolah mana. Jika tidak lulus pada tahap I, siswa dapat mendaftar kembali tahap II untuk sekolah-sekolah yang masih kosong bangkunya.

Di Depok Provinsi Jawa Barat, proses PSB lain lagi ceritanya. Siswa harus mendaftar di setiap sekolah yang diinginkan dengan berkas pendaftaran asli, sehingga bila sudah mendaftar di satu sekolah, siswa tidak dapat mendaftar di sekolah yang lain. Setiap hari akan ada pengumuman (jurnal) penerimaan dari sekolah tersebut. Jika tidak diterima, asal masih dalam batas waktu pendaftaran (satu minggu) siswa dapat menarik berkas pendaftarannya dan memilih sekolah lain. Memang, masyarakat tidak perlu datang ke sekolah untuk melihat jurnal penerimaan setiap harinya. Panitia PSB telah membuat situs penerimaan siswa baru yang terkoordinasi. Namun dalam kenyataannya, keterbukaan yang coba dilakukan oleh pemerintah daerah, belum terbuka sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Jika melihat situs PSB tersebut, mata akan terbelalak karena akan ditemukan nilai-nilai yang sangat tinggi yang diperoleh oleh siswa. Contoh saja, di SMA 2 Depok, pada hari keempat pendaftaran ditemukan adanya nilai 30,33. Kejanggalan yang luar biasa karena hanya ada tiga pelajaran yang diujikan sehingga nilai rata-rata adalah 10,11. Dari manakah nilai ini bisa muncul? Ternyata Ujian Nasional yang dianggap hanya dari hasil ujian tulis, dapat ditambah dengan prestasi siswa lainnya, yang nilainya penambahannya cukup signifikan mempengaruhi besaran nilai Ujian Nasional berkisar 3-7 poin tergantung dari prestasi. Tetapi, seberapa transparan pemberian nilai “bonus” dilakukan oleh sekolah tidak pernah dijelaskan oleh sekolah secara terbuka.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Evaluasi Publik atas Perolehan Informasi Penerimaan Siswa Baru (Studi pada Pelajar SMA

Negeri Kelas 1 Tahun Ajaran 2007/2008 di Wilayah Kota Depok). Sebagai negara yang sedang mengalami proses demokratisasi, yang menganggap kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, Indonesia tak bisa mengabaikan unsur-unsur demokratisasi seperti prinsip keterbukaan, wacana publik, kemudahan akses terhadap saluran komunikasi hingga kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat. Seperti juga negara lain, Indonesia mau tidak mau memasuki masa yang disebut oleh Keniichi Ohmae sebagai *borderless world*.

Globalisasi di semua bidang, termasuk bidang hukum, telah melahirkan apa yang disebut Rodney A. Smollar sebagai masyarakat terbuka (*open society*). Mengutip pandangan Haiman dalam buku *Speech and Law in a Free Society*, Smollar menulis:

“A society that wishes to adopt openness as a value of overarching significance will not merely allow citizen a wide range of individual expressive freedom, but will go on step further and actually open up the deliberate processes of government itself to the sunlight of public scrutiny. In a truly open culture, the normal rule is that government does not conduct the business of the people behind closed doors. Legislative, administrative, and judicial proceedings should – as a matter of routine – be open to the public” (Smollar, 1992: 12).

Istilah keterbukaan sering dipakai untuk menggantikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal sebagai prinsip utama *good governance*. Prinsip ini tidak lagi dipakai hanya untuk menggambarkan reformasi birokrasi di bidang ekonomi, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain.

Amandemen kedua UUD 1945 menjadikan informasi, termasuk informasi hukum, sebagai bagian dari hak-hak dasar manusia. Pasal 28F menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Walaupun hak atas informasi tersebut telah diberi landasan hukum yang kuat, namun selama ini, masih banyak masalah yang timbul baik pada tataran teoritis maupun pragmatis, dan masih terdapat perbedaan

pandangan mengenai penguatan akses terhadap informasi dan dokumentasi hukum. Sebagian lainnya disebabkan peraturan perundang-undangan yang memang menutup rapat-rapat aksesibilitas masyarakat. Di satu sisi, tidak sedikit pula peraturan perundang-undangan yang amat kabur mengaturnya, sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada tafsir penyelenggara pemerintahan. Di sisi lain, tidak semua warga negara mengetahui adanya suatu hukum atau perundang-undangan baru.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti pemerintah pusat telah memindahkan sebagian besar kewenangan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan tentu saja pada akhirnya pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom.

Salah satu konsep yang melekat pada otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan. Pasal 10 ayat (4) UU 32/2004 tersebut menyebutkan bahwa pemerintah (pusat) dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah di daerah atau menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Ada dua jenis urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang berskala provinsi dari 16 urusan wajib seperti tercatat pada Pasal 13 ayat (1) dan berskala kabupaten kota dari 16 urusan wajib pada Pasal 14 ayat (1). Dengan kondisi seperti ini, maka setiap kota atau kabupaten dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 adalah kurikulum yang di dalamnya menuntut siswa untuk aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa

meninggalkan kerjasama dan solidaritas. Intinya, agar KBK 2004 berhasil, otonomi sekolah mutlak diberikan, yaitu dengan payung Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Para pendidik dituntut untuk bersikap profesional, kreatif dan fleksibel, agar terbentuk proses belajar yang efektif. MBS adalah sebuah konsep yang memberikan wewenang kepada sekolah (bersama masyarakat sekitar), untuk mengambil keputusan-keputusan konkret dalam mengelola pendidikan, memperbaiki kurikulum sehingga mutunya meningkat.

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat berhak untuk ikut berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pelajar kelas 1 pada tahun ajaran 2007/2008 SMA Negeri di Depok. Pemilihan populasi pelajar kelas 1 pada tahun ajaran 2007/2008 adalah karena mereka baru saja mengalami proses PSB (bulan Juni-Juli 2007) sehingga dengan lebih mudah melakukan evaluasi terhadap PSB 2007. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster probability sampling* dari kelas yang ada di setiap sekolah. Jumlah keseluruhan sampel sebanyak 285 responden. Selain survei, data primer juga dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak SMA Negeri (ada 6 SMA Negeri di Depok), pihak Dinas Pendidikan kota Depok sebagai pengelola situs PSB, dan pihak orangtua selaku *stakeholders* pendidikan. Teknik analisis data menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik, dan ukuran pemusatan.

Depok merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Wilayah DKI Jakarta. Kota ini merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Selain bus, Kereta Rel Listrik (KRL) dua jalur dengan ongkos yang terjangkau menjadi pilihan warga Depok untuk komuter ke Jakarta. Dari situs resmi

pemerintah Kota Depok diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2001 terdapat 1.204.687 jiwa, padahal pada tahun 2000 Depok baru memiliki penduduk sebanyak 1.145.091 jiwa. Wilayah Depok terbagi atas enam kecamatan yaitu Limo, Beji, Sawangan, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Cimanggis.

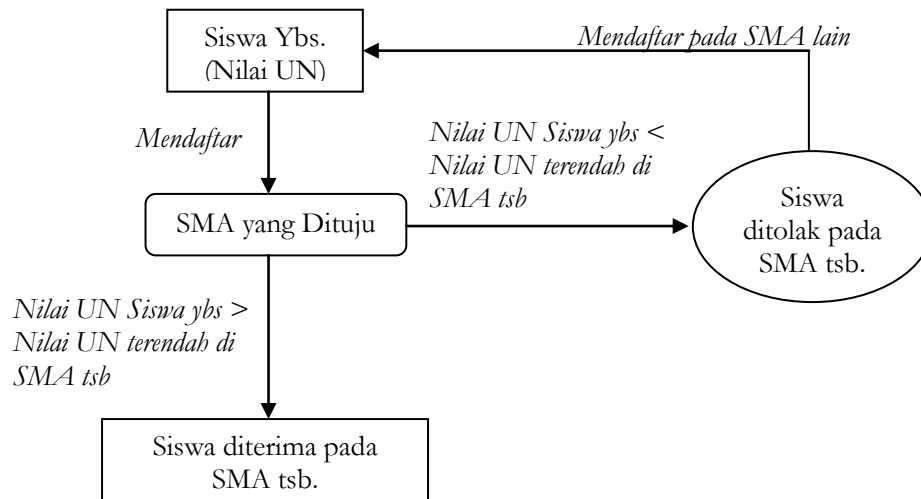
Perkembangan Depok yang demikian pesat juga ditandai dengan kemunculan pusat-pusat perbelanjaan di sepanjang Jalan Margonda Raya seperti Margo City Square, Depok Town Square, Mal Depok, Plaza Depok, dan ITC Depok, di Jalan Sawangan yaitu Depok Town Center, dan di Jalan Raya Bogor yaitu Mal Cimanggis. Salah satu penyebab pertumbuhan pusat perbelanjaan ini adalah banyaknya dibangun pemukiman-pemukiman baru di wilayah kota Depok. Kawasan perumahan banyak berkembang di wilayah kota bagian utara yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Kecamatan Limo, Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas bagian utara.

Depok dapat juga disebut kota pendidikan. Di tingkat pendidikan tinggi, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di Depok adalah Universitas Indonesia. Selain itu ada beberapa perguruan tinggi swasta yang juga memilih Depok sebagai lokasi pendidikan, antara lain Universitas Gunadarma, Bina Sarana Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, dan IBLAM. Di tingkat pendidikan menengah, ratusan SMP dan SMA berada di Depok. Prestasi pendidikan di Depok tidak begitu mengecewakan meskipun hasil UN tahun 2006 hasil kelulusannya paling rendah di tingkat Jawa Barat, tetapi kenyataannya dari 80% yang lulus telah membawa nama harum Propinsi Jawa Barat di Olimpiade yang diadakan di Semarang, Kota Depok memberikan kontribusi 60% dari perolehan medali emas disumbangkan oleh pelajar Kota Depok. Untuk itu Walikota berharap dengan semakin besarnya alokasi dana di bidang pendidikan maka mutu pendidikan juga akan semakin meningkat di Kota Depok.

Hasil Penelitian

Sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) di setiap wilayah akan berbeda karena adanya otonomi pendidikan. Di Jakarta, misalnya, sistem PSB di setiap wilayah dipusatkan di satu sekolah. Siswa hanya perlu membawa

berkas pendaftaran di sekolah yang dijadikan pusat pendaftaran. Siswa kemudian memilih 3 (tiga) sekolah yang akan dipilih. Kemudian, siswa hanya akan menunggu apakah yang bersangkutan diterima di sekolah yang dituju. Jika tidak lulus atau diterima di sekolah yang dituju, siswa dapat mendaftarkan diri pada gelombang selanjutnya. Gelombang kedua ini ditujukan agar sekolah tidak mengalami kekosongan murid. Diterima atau tidaknya siswa dapat dilihat pada situs PSB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

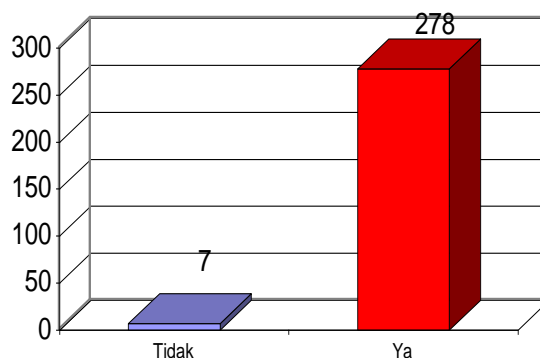


Gambar 1. Tata Alir Proses Pendaftaran Siswa Baru SMA di Depok

Sumber: Diolah peneliti dari hasil wawancara dengan Dinas

Di Depok lain lagi ceritanya. Sistem PSB di wilayah ini menggunakan sistem jurnal harian. Siswa harus mendaftar pada tanggal yang ditentukan di satu sekolah yang dituju dengan membawa berkas asli. Pada sore hari atau keesokan harinya, siswa dapat melihat apakah dengan nilai yang dimilikinya masih dimungkinkan kepada yang bersangkutan untuk diterima. Jika dinyatakan gagal, maka siswa dapat mengambil berkas pendaftarannya dan kemudian mendaftar di sekolah negeri lainnya. Proses ini berlangsung

selama seminggu. Jurnal harian ini akan diumumkan di sore hari atau keesokan harinya pada papan pengumuman, atau dapat melihat pada situs PSB yang dikelola Dinas Pendidikan Depok. Ketentuan apakah siswa yang bersangkutan diterima atau tidak akan ditentukan pada hari terakhir. Proses ini terjadi baik di SMP maupun SMA. Pendaftaran ini dapat juga dilakukan secara kolektif oleh guru di sekolah asal, seperti yang terjadi di salah satu SMP swasta di Depok. Siswa atau orangtua hanya tinggal menunggu nasib diterima di sekolah yang dipilih oleh sekolah asal.



Grafik 1 - Perolehan Informasi dari Sekolah/Guru tentang Pelaksanaan UN

Sumber: hasil penelitian, 2008

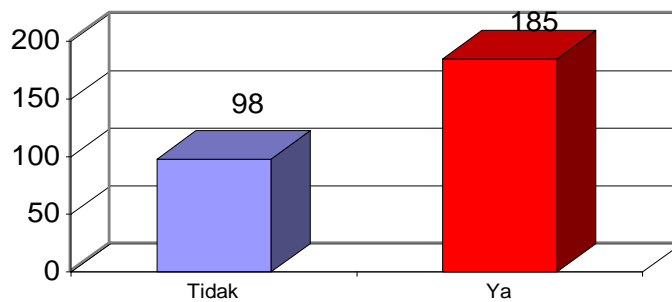
Informasi yang didapatkan oleh siswa tentang kegiatan UN sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap kesiapan siswa dalam menghadapi UN. Dari grafik di atas diketahui bahwa sebanyak 97,54% responden mengatakan bahwa mereka telah memperoleh informasi dari sekolah atau guru tentang pelaksanaan UN, sedangkan responden yang merasa tidak menerima informasi dari guru atau sekolah hanya 6,46% saja. Dari responden yang memperoleh informasi tersebut, informasi terbanyak yang pertama kali mereka terima adalah mengenai jadwal pelaksanaan UN (41,40%), sedangkan terbanyak kedua adalah informasi mengenai jenis soal

UN (33,33%) dan terbanyak ketiga adalah informasi mengenai cara menjawab UN (31,23%), terbanyak selanjutnya berkaitan dengan informasi mengenai contoh soal, dan lain-lain. Bagi guru atau sekolah, UN akan memberikan citra seberapa berkualitas sekolah tersebut, sehingga, seringkali walaupun mungkin akan dianggap melakukan "kecurangan", sekolah atau guru tetap memberikan sedikit "bocoran" atau trik menjawab soal secara cepat. Untuk menambah kualitas ini pun, sekolah mengadakan jam pelajaran tambahan setiap harinya untuk 3 (tiga) mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Jam tambahan ini diberikan pukul 06.00 hingga pukul 07.00. Pelibatan orang tua oleh sekolah juga penting dalam rangka menyukseskan UN.

Dari 285 responden yang ditanya mengenai pelibatan orang tua mereka oleh sekolah masing-masing sebelum pelaksanaan UN, diketahui bahwa sebanyak 84,56% responden menyatakan bahwa orang tua mereka dilibatkan oleh sekolah sedangkan 15,44% mengaku tidak dilibatkan. Dari responden yang menjawab dilibatkan, bentuk pelibatan yang paling banyak dilakukan oleh sekolah adalah dengan melakukan rapat dengan orang tua siswa, atau mengirim surat dan mengundang rapat dan selebihnya hanya dengan mengirim surat saja. Selain melakukan jam pelajaran tambahan, sekolah atau guru pun juga melakukan beberapa kali uji coba untuk mengetahui tingkat perkembangan pemahaman siswanya. Hasil dari uji coba ini diinformasikan sekolah kepada orangtua atau wali siswa. Rapat biasanya bukan hanya menjelaskan secara rinci tentang persiapan UN dan apa yang harus dilakukan oleh orangtua agar anaknya siap menghadapi UN, tetapi juga biasanya terkait dengan penjelasan biaya-biaya akhir, seperti biaya perpindahan, biaya pendaftaran di sekolah baru, dan sebagainya. Kadang-kadang juga diberikan sisipan pembiayaan seperti biaya jam pelajaran tambahan dan "biaya terima kasih siswa untuk guru atau kepala sekolahnya." Selain jam pelajaran tambahan, langkah lain yang juga dilakukan orangtua dalam rangka menghadapi UN adalah dengan mengikutsertakan anak mereka dalam bimbingan belajar yang diadakan oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar.

Bimbingan belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung suksesnya siswa dalam mengerjakan soal UN. Alasan mereka

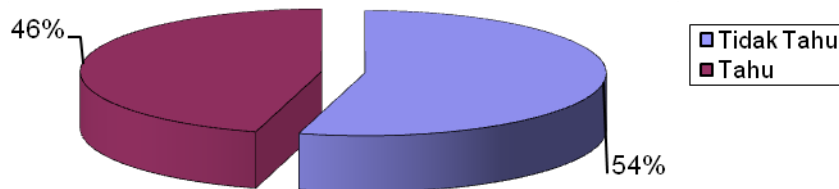
mengikuti bimbingan belajar sangat bervariasi. Namun alasan terbanyak adalah karena ingin menguasai materi UN (40%), kemudian sebagai persiapan menghadapi UN (21,08%), dan karena ingin nilai UN yang baik (16,76%), selebihnya adalah karena berbagai alasan lain seperti ingin meningkatkan motivasi belajar, ingin mengetahui kisi-kisi soal UN, memang merupakan program sekolah, dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan, lembaga bimbingan belajar menjamur di Depok. Lembaga bimbingan belajar yang kadang mengatasnamakan alumni perguruan tinggi negeri menjadi pilihan utama orangtua ketimbang masalah jarak atau biaya. Mereka biasanya menyelenggarakan kelas paket, dari paket intensif hingga super intensif. Harga yang mesti dibayar orangtua pun tidak murah, bahkan dapat mencapai nilai jutaan. Kadang, lembaga bimbingan belajar tidak cukup menjadi pilihan orangtua. Lembaga bahasa yang menyelenggarakan pendidikan tambahan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pun menjadi tujuan. Bagi mereka yang memiliki uang tambahan, lebih senang memilih mendatangkan guru privat. ”Soalnya anak lebih konsen dan mendapat perhatian lebih, daripada di bimbel kan ramai-ramai. Selain itu, lebih mudah diawasi karena diselenggarakan di rumah”.



Grafik 2- Keikutsertaan Responden dalam Bimbingan Belajar

Sumber: hasil penelitian, 2008

Adanya nilai tambahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok terhadap siswa SMP yang memiliki prestasi di bidang non akademik (seni dan olah raga) memungkinkan para siswa yang memiliki kekurangan di bidang akademis namun memiliki kelebihan dibidang lain mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke SMU yang diunggulkan.



Grafik 3 - Pengetahuan Responden Tentang Nilai Tambahan pada UN

Sumber: hasil penelitian, 2008

Besaran nilai tambahan ini pun disesuaikan dengan keputusan kepala dinas. Nilai ini berada pada rentang 3 hingga 7,5 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Konversi Nilai Tambahan atas Prestasi Siswa

Peringkat \ Tingkat Kejuaraan	Nasional	Propinsi	Wilayah	Kota
	Nilai Tambahan			
Juara 1	7,5	6	4,5	4
Juara 2	7	5,5	4	3,5
Juara 3	6,5	5	3,5	3

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan laporan PSB SMA Negeri 2 Depok

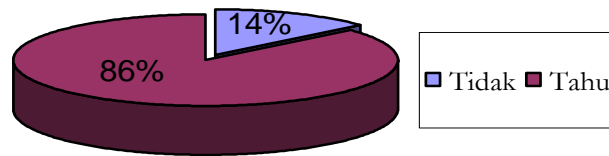
Penilaian ini dapat digunakan untuk prestasi perorangan atau kelompok. Jika prestasi yang diperoleh lebih dari satu, maka siswa dapat memilih prestasi yang paling tinggi. Nilai ini setelah disahkan oleh pihak dinas dan dikonversi ke dalam akan diberikan pada panitia PSB sehingga

nilai UN siswa dapat bertambah. Dari 285 responden yang ditanyakan mengenai informasi tentang adanya nilai tambahan, hanya 54,39% yang mengetahui tentang adanya nilai tambahan sedangkan 45,61% tidak mengetahui. Informasi tersebut umumnya didapatkan dari guru, dan teman sebanyak 66,92% menerima informasi setelah pelaksanaan UN. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya siswa terlambat mengetahui tentang adanya nilai tambahan, sehingga peluang mereka untuk mempersiapkan diri dengan berprestasi diluar akademik menjadi hilang. Dan dari responden yang mengetahui informasi tersebut sebelum UN (33,08%), hampir 82% mengetahuinya pada saat duduk dikelas III SMP. Sehingga walaupun mereka mengetahui sebelum pelaksanaan UN namun tetap saja terlambat untuk mereka bisa berprestasi. Karena ketika mereka sudah duduk di kelas III, mereka lebih banyak fokus ke akademik, dan kurikulum sekolahpun umumnya mengarahkan siswa untuk mempersiapkan UN sehingga kegiatan-kegiatan diluar akademik mulai dikurangi. Namun demikian, ada suatu hal yang cukup ironis mengenai sosialisasi penambahan nilai UN di SMP ini. Sosialisasi mengenai penambahan nilai ini pun dirasa kurang oleh Panitia Penerimaan Siswa Baru di SMA.

Banyaknya jenis kriteria sebagai syarat penambahan nilai UN di SMP yang diberikan responden mengindikasikan bahwa tidak adanya informasi yang jelas dari berbagai pihak. Para siswa dikorbankan dengan adanya berbagai macam informasi yang simpang siur. Pihak sekolah (dalam hal ini guru di SMP) sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan siswa seharusnya memegang peranan penting sebagai sumber informasi yang akurat mengenai kriteria penambahan nilai UN. Selain itu, Dinas Pendidikan juga seharusnya memberikan informasi resmi yang jelas mengenai kriteria penambahan nilai yang sesungguhnya kepada para orangtua dan siswa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi seperti yang telah disebutkan di atas.

Berkaitan dengan proses pendaftaran siswa SMA di Depok, sumber informasi yang didapat responden pun bermacam-macam seperti dari teman, orangtua, atau bahkan dari tetangga. Hal ini juga menunjukkan bahwa teman dan pihak sekolah (guru) memegang peranan yang cukup penting dalam penyebarluasan proses pendaftaran sekolah bagi para

responden. Oleh karena itu, pemberian informasi yang jelas dan berkesinambungan kepada para siswa dan guru menjadi suatu hal yang penting dalam proses penerimaan siswa baru.



Grafik 4 - Pengetahuan Responden tentang SMA yang Dituju

Sumber: hasil penelitian, 2008

Responden mengetahui beberapa informasi lain, seperti sarana dan prasarana sekolah yang dituju, kurikulum sekolah, dan berbagai macam ekstrakurikuler yang diadakan. Selain itu, beberapa responden juga menjawab hal-hal lain yang diketahui mengenai SMA yang dituju. Misalnya, mutu sekolah, prestasi sekolah, budaya dan peraturan sekolah, serta biaya sekolah yang dituju.

Minimnya pengetahuan responden tentang mutu sekolah, budaya/peraturan sekolah, dan biaya sekolah yang dituju menunjukkan bahwa selama ini informasi mengenai hal-hal tersebut sedikit sekali diberitahukan. Padahal, mutu sekolah, budaya/peraturan sekolah, dan biaya sekolah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan transparansi sekolah tersebut dalam proses pendaftaran siswa baru di Depok.

Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya mengenai SMA yang dituju bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Depok, namun juga menjadi tanggung jawab SMA yang bersangkutan. Namun hal ini kurang menjadi perhatian serius setiap SMA di Kota Depok. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salah seorang informan

berkaitan dengan sosialisasi SMA yang bersangkutan kepada calon siswa yang masih belajar di SMP.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa 57% responden (162 orang) menyatakan tidak pernah membuka situs PSB yang dikelola Dinas Pendidikan. Sisanya 42% (121 orang) menyatakan pernah membuka situs PSB. Ketika ditanyakan lebih lanjut, apakah situs PSB tersebut bermanfaat, dari 121 responden yang pernah membuka, sebanyak 71 orang atau 59% menyatakan info yang ada di situs PSB tersebut telah memadai. Namun jika ditanyakan kepada panitia PSB di sekolah tentang manfaat situs ini, ada beberapa komentar yang berhasil dikumpulkan peneliti, yaitu: prosedur penerimaan menjadi lebih lama, situs yang ada belum sempurna, situs yang ada bermanfaat bagi orang tua.

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih optimal, seorang informan menyarankan agar adanya perbaikan dalam situs yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Depok tersebut. Terdapat beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan adanya situs PSB tersebut. Kendala-kendala tersebut terkait dengan data yang tidak akurat (*up date*), informasi yang tidak lengkap, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data tersebut. Pihak Dinas Pendidikan Depok sendiri menyatakan bahwa situs PSB diperlukan karena sekarang semuanya sudah Internet. Memang dirasakan belum optimal tapi yang penting tetap diusahakan. Ada beberapa kelemahan, yaitu dari sumber daya yaitu baru kenal dunia maya belum lama. Pengelolaan memang diserahkan kepada instansi swasta yang terkait. Pendanaan situs ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Dari hasil-hasil penelitian tersebut, memang terlihat, masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan PSB SMA Negeri di Depok. Kondisi ini tentu saja pada akhirnya dapat merugikan sebagian siswa dan juga sekolah. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan sebagai pengampu dari sekolah-sekolah ini diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih transparan dan mempermudah pelaksanaannya sehingga keadilan dalam berpendidikan dialami oleh semua lapisan.

Kesimpulan

Salah satu hal yang terkait dengan pelaksanaan PSB SMA Negeri di Depok tahun 2007 adalah pemberian informasi kepada siswa mengenai kriteria penambahan nilai UN karena adanya prestasi siswa di luar sekolah. Informasi tidak disosialisasikan lebih awal, termasuk kriteria dan bobot penilaiannya. Kondisi ini akhirnya menimbulkan prasangka ketidakadilan akan sistem penilaian yang ada.

Dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan sistem *semi online* ini masih ditemui masalah, antara lain penyediaan sumber daya baik teknologi maupun manusianya. Dengan sistem ini pula akhirnya masih ditemukan adanya masalah.

Ada beberapa usulan yang dapat diterapkan terkait dengan perbaikan PSB Depok, yaitu: (1) kebijakan Dinas Pendidikan (seperti penambahan nilai UN) sebaiknya diberitahukan secara lengkap dan jelas kepada para siswa. Pemberitahuan ini seharusnya dilakukan jauh-jauh sebelum pelaksanaan UN. Dengan informasi lebih awal diharapkan semua siswa merasa diberi kesempatan untuk menaikkan nilai yang dimiliki dengan prestasi di luar sekolah. (2) persiapan lebih matang dalam penerapan teknologi, termasuk mempersiapkan perangkat keras (komputer dan jaringannya) dan juga perangkat lunaknya (pelatihan yang lebih mendalam bagi sumber daya pengelola). (3) memperbaiki prosedur PSB yang ada sehingga lebih praktis. (4) memperbaiki sistem kearsipan baik di sekolah maupun di dinas pendidikan, sehingga mempermudah upaya mengevaluasi kebijakan yang dibuat. (5) melibatkan *stakeholders* lebih banyak dalam pengelolaan pendidikan SMA di Depok, misalnya dengan melakukan kerjasama yang lebih luas dengan perguruan tinggi atau dunia industri/swasta.

Daftar Pustaka

- Friedrick, Carl J. (1963). *Man and His Government*, New York: McGraw Hill.
Smollar, Rodney A. (1992). *Free Speech in an Open Society*. New York: Vintage Book.

Soros, George. (2007). *Open Society: Reforming Global Capitalism*, terjemahan Sri Koesdiyantinah Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, dan kata pengantar dari M. Dawam Rahardjo.

Harian Kompas, 4 September 2004.

<http://www.depok.go.id>

<http://www.puspendik.com>.

Biodata

Lina Miftahul Jannah adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada Departemen Ilmu Administrasi. Ia menamatkan pendidikan S2 nya di Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI tahun 2000. Ia mengasuh beberapa mata kuliah, di antaranya Metode Penelitian Sosial, Statistik Sosial I, dan Perilaku Organisasi. Penulis yang juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi utama FISIP-UI tahun 1995 ini, selain menjadi peneliti, juga menulis beberapa buku yaitu Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, ditulis bersama Bambang Prasetyo (diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, 2005-sudah cetakan ketiga) dan beberapa buku bahan ajar untuk Universitas Terbuka, yaitu Riset Pemasaran (2001) dan Statistik Sosial I (2001). Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Selo Soemardjan Research Center Universitas Indonesia dan juga aktif menulis di beberapa jurnal terakreditasi. Saat ini yang bersangkutan sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia.